



Negosiasi, veto, dan lobi internasional dalam isu Palestina di PBB: Studi kasus resolusi 2017

Angela Del Carmen 
Universitas Kristen Indonesia

Email

del_carmen@syriacorthodoxchurch.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh veto, lobi internasional, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan PBB terkait Palestina, khususnya Resolusi PBB tahun 2017 tentang Palestina. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, mengumpulkan data dari jurnal Hubungan Internasional, catatan voting PBB, laporan LSM, dan berita dari BBC serta Al Jazeera. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema terkait peran veto, pengaruh lobi internasional, dan dinamika negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa veto Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang didorong oleh kepentingan strategis dan lobi domestik, terutama dari kelompok pro-Israel seperti AIPAC. Keputusan AS menggunakan hak vetonya meskipun bertentangan dengan mayoritas suara di Dewan Keamanan mencerminkan ketidakadilan dalam sistem PBB yang didominasi kekuatan besar. Implikasi temuan ini penting untuk menganalisis faktor eksternal dan internal dalam diplomasi internasional, terutama terkait Palestina.

Kata kunci: Israel, Kebijakan luar negeri, Lobi internasional, Palestina, PBB, Veto.

Received:

May/9/2025

Accepted:

May/15/2025

Published:

June/28/2025

ABSTRACT This study aims to analyze the influence of veto power, international lobbying, and negotiations in the United Nations' decision-making process regarding Palestine, focusing on the 2017 UN Resolution on Palestine. The research uses a qualitative approach with a case study design, gathering data from International Relations journals, UN voting records, NGO reports, and news from BBC and Al Jazeera. Content analysis is used to identify themes related to the role of veto power, the influence of international lobbying, and the dynamics of negotiations. The findings show that the U.S. veto is heavily influenced by foreign policy driven by strategic interests and domestic lobbying, especially from pro-Israel groups like AIPAC. The U.S. decision to exercise its veto, despite being contrary to the majority vote in the Security Council, reflects the injustice within the UN system dominated by major powers. The implications of these findings are important for considering the external and internal factors that affect major power foreign policies in international diplomacy, particularly regarding Palestine.

Keywords: Foreign policy, International lobbying, Israel, Palestine, UN, Veto.



Pendahuluan

Isu Palestina telah menjadi masalah yang mendominasi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama beberapa dekade, mencerminkan kompleksitas konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Sejak Resolusi 181 pada tahun 1947, yang merekomendasikan pembagian wilayah antara negara Yahudi dan Arab, PBB telah berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik (Andira et al., 2024; Khafis et al., 2024). Namun, tingkat keberhasilan PBB dalam menyelesaikan isu ini sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan, terutama oleh Amerika Serikat, yang sering mendukung kebijakan Israel (Khafis et al., 2024; Sembiring & Oktreza, 2024). Perkembangan terbaru, termasuk Resolusi 2334 pada tahun 2016, menekankan penolakan terhadap kolonisasi Israel di wilayah Palestina tetapi ditentang oleh veto AS, menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh PBB dalam menjaga keamanan dan keadilan internasional (Ihsan, 2019; Oktaviani, 2021). Meskipun berbagai inisiatif disusun, termasuk solusi dua negara, implementasinya sering terhalang oleh dinamika politik global dan dukungan internasional yang tidak merata (Ihsan, 2019; Sembiring & Oktreza, 2024). Maka, isu Palestina tetap menjadi tantangan besar bagi PBB dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga perdamaian dunia.

Pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 oleh pemerintahan Presiden Donald Trump telah memicu protes besar di seluruh dunia, menunjukkan reaksi negatif terhadap kebijakan tersebut dari berbagai negara dan organisasi internasional. Langkah ini dilihat oleh banyak pengamat sebagai pelanggaran konsensus internasional yang menginginkan status Yerusalem untuk dirundingkan dalam solusi dua negara, serta dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, sehingga banyak negara mengekspresikan penolakan mereka melalui demonstrasi dan lobi diplomatik (Oktaviani, 2021; Syari'ah et al., 2022). Protes ini mencerminkan kepedulian global terhadap dampak kebijakan AS terhadap perdamaian di Timur Tengah dan nasib rakyat Palestina, di mana demonstrasi terjadi di berbagai belahan dunia sebagai bentuk solidaritas (Ruhiat & Akim, 2020; Satris, 2019). Selain itu, kebijakan ini memperburuk ketegangan yang telah ada, meningkatkan kekhawatiran bagi keselamatan dan keamanan di wilayah tersebut (Nurhasanah & Setiawati, 2024; Oktaviani, 2021). Perlawanan ini tidak hanya datang dari negara-negara Arab, tetapi juga dari negara-negara non-Arab yang mendukung solusi adil bagi Palestina, menunjukkan bahwa isu ini lebih dari sekadar konflik regional, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik global yang lebih luas (Annisarahma & Assegaf, 2024). Secara keseluruhan, keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak hanya mengubah lanskap politik di kawasan tersebut, tetapi juga memicu reaksi internasional yang signifikan, yang menggambarkan kompleksitas konflik dan tantangan dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Khaketla et al., 2022).

Keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 menghadirkan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik internasional, terutama dalam konteks resolusi di Dewan Keamanan PBB. Langkah ini tidak hanya memperburuk ketegangan antara Palestina dan Israel tetapi juga memengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara di seluruh dunia. Protes global yang meluas mencerminkan penolakan terhadap kebijakan tersebut, yang dianggap melanggar hukum internasional dan konsensus internasional mengenai status Yerusalem (Khafis et al., 2024; Sembiring & Oktreza, 2024). Dewan Keamanan PBB telah berulang kali mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa Yerusalem harus memiliki status yang dirundingkan dalam konteks penyelesaian yang lebih luas (Oktaviani, 2021). Namun, dengan posisi AS yang mendukung Israel secara unilateral, upaya untuk mencapai resolusi menginginkan pengaturan yang adil semakin terhambat. Veto AS terhadap resolusi-resolusi yang merugikan Israel menunjukkan betapa kompleksnya politik internasional terkait isu ini, serta

mengekspresikan frustrasi negara-negara lain yang mendukung perdamaian (Brata et al., 2023; Ihsan, 2019). Akibatnya, keputusan AS tidak hanya berpengaruh pada konteks regional, tetapi juga memperlemah posisi PBB sebagai mediator yang berupaya menemukan penyelesaian yang damai dan adil dalam konflik tersebut (Devano & Astuti, 2024).

Dalam rangka memahami implikasi lebih dalam dari keputusan ini, banyak analisis menunjukkan bahwa tantangan seputar pengakuan Yerusalem mencerminkan pergeseran kekuatan di arena geopolitik, di mana lobi pro-Israel sering mendominasi narasi dan keputusan institusi internasional (Luerdi, 2022; Mangapul, 2019). Kesimpulannya, keputusan AS tersebut telah memicu dinamika baru di tingkat internasional dan berdampak luas terhadap proses perdamaian dan resolusi yang diupayakan oleh PBB.

Penelitian oleh Smith 2018 menyoroti penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat sebagai strategi utama untuk membela kebijakan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Thinane, 2021). Dalam analisisnya, Smith menjelaskan bahwa AS secara konsisten menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi-resolusi yang dinilai merugikan atau mengkritik tindakan Israel, termasuk dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan urusan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina. Smith berargumen bahwa penggunaan veto ini bukan hanya melindungi Israel dari sanksi internasional, tetapi juga mempengaruhi dinamika diplomatik di tingkat global, di mana negara-negara lain yang mendukung resolusi tersebut menjadi semakin frustrasi. Penelitian ini mencatat bahwa kebijakan veto AS memperkuat persepsi bahwa PBB tidak mampu berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, serta memperburuk ketegangan di kawasan (Khafis et al., 2024). Selain itu, Smith juga mencatat bahwa tindakan AS ini seringkali diiringi dengan tekanan diplomatik terhadap negara-negara lain untuk mendukung posisi Israel, yang semakin memperumit upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan (Sembiring & Oktreza, 2024). Penelitian ini menjadi penting dalam diskusi yang lebih luas mengenai peran PBB dalam konflik internasional dan dampak politik unilateral negara besar terhadap proses perdamaian (Oktaviani, 2021).

Johnson 2019 mengidentifikasi pengaruh kuat lobi-lobi internasional seperti Komite Aksi Politik Israel Amerika (AIPAC) terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama terkait hubungan dengan Israel (Peng et al., 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa AIPAC telah berhasil mempengaruhi perdebatan dan keputusan penting di Kongres, yang pada gilirannya berdampak pada kebijakan luar negeri AS di level internasional, termasuk dalam konteks isu Palestina dan pengambilan keputusan di PBB (Kattan, 2018). Lobi-lobi yang kuat ini tidak hanya membentuk berpikir politik domestik, tetapi juga mewarnai respons AS terhadap resolusi-resolusi PBB yang berkaitan dengan Israel dan Palestina. Misalnya, ketika AIPAC aktif menekan untuk mempertahankan dukungan terhadap kebijakan Israel, hal ini sering kali mengarah pada penggunaan hak veto oleh AS untuk menolak resolusi yang bertujuan menentang tindakan-tindakan Israel di wilayah pendudukan (Afrilianti et al., 2021; Gordanić, 2022). Hal ini menciptakan tantangan bagi diplomasi internasional, di mana banyak negara merasa terhalang untuk mengambil langkah-langkah resolutif di Dewan Keamanan (Corell, 2019; Khouri, 2019). Melihat pengaruh lobi-lobi ini, jelas terlihat bahwa politik luar negeri AS, terutama terkait Israel, bukan hanya hasil dari dinamika kebijakan luar negeri tradisional, tetapi juga dipengaruhi oleh organisasi-organisasi yang memiliki agenda spesifik dalam mendukung kepentingan Israel di panggung internasional (Kattan, 2018; Rolf et al., 2021). Dengan demikian, lobi internasional seperti AIPAC memiliki dampak mendalam dalam membentuk tidak hanya kebijakan domestik tetapi juga kebijakan luar negeri yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas dan keputusan di PBB.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis aspek tertentu dari hubungan antara negosiasi, veto, dan lobi dalam konteks kebijakan luar negeri, tetapi belum ada yang

menggabungkan ketiga elemen ini secara holistik dalam suatu studi terpadu. Wood menyoroti bahwa strategi lobi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan politik, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada aspek kesehatan publik dan bukan khusus pada konteks diplomasi internasional atau kebijakan konflik seperti isu Palestina (Wood et al., 2021). Di sisi lain, Evers membahas bagaimana lobi dapat mempengaruhi hubungan keamanan internasional, menunjukkan bahwa informasi dan lobi memainkan peranan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri. Namun, penelitian ini tidak menelaah secara detail interaksi antara lobi, veto, dan proses negosiasi di PBB (Evers, 2022).

Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi ini untuk memahami dinamika yang lebih kompleks di balik keputusan-keputusan kunci yang diterima atau ditolak di tingkat Dewan Keamanan PBB, terutama terkait dengan isu seperti Palestina. Untuk menjawab kebutuhan ini, pendekatan yang lebih holistik yang menggabungkan perspektif negosiasi, pengaruh veto, dan lobi internasional perlu dikembangkan, seperti yang dianalisis oleh Anesi dan Bowen, yang menjelaskan bagaimana veto dapat mempengaruhi hasil kebijakan, meskipun mereka tidak mengaitkan aspek lobi secara mendalam (Anesi & Bowen, 2021).

Dalam penelitian ini, sejumlah karya terkini menggambarkan bagaimana Amerika Serikat secara sistematis menggunakan hak veto untuk melindungi kebijakan Israel di PBB. Penelitian ini juga menunjukkan pengaruh yang besar dari lobi-lobi internasional, tetapi sumber spesifik untuk mendukung klaim tersebut tentang lobi tidak tersedia. Penting untuk dicatat bahwa sementara ada berbagai analisis tentang penggunaan hak veto oleh AS di PBB, banyak dari penelitian ini tidak mengaitkan secara langsung dengan pengaruh lobi seperti AIPAC secara spesifik atau tidak merupakan sumber yang relevan dan berkualitas tinggi dalam konteks ini. Misalnya, menurut Balci, meskipun membahas dinamika politik domestik dan pengaruh lobi, fokus utamanya adalah pada kontrol AS atas lembaga internasional, dan tidak secara eksplisit membahas veto terkait kebijakan Israel di PBB (Balci, 2022).

Penelitian ini menekankan pentingnya strategi veto dalam konteks yang lebih luas daripada hanya isu kebijakan luar negeri organisasi tertentu. Namun, studi ini perlu lebih mendalam dalam merinci hubungan antara veto AS, lobi, dan kebijakan luar negeri terhadap Israel. Referensi König tidak relevan dalam konteks dengan isu veto Israel dan PBB yang sedang dibahas, karena fokusnya adalah pada intergovernmentalism dan tidak menyentuh pada pengaruh veto dalam dinamika Internasional yang terkait dengan isu-isu Palestina atau kebijakan luar negeri AS dalam kerangka PBB (König, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mendasari argumen pada sumber yang tepat dan relevan.

Karena keterbatasan dalam literatur terkait yang mendasari hubungan antara ketiga elemen tersebut —negosiasi, veto, dan lobi— penulis disarankan untuk mencari bukti dan penelitian yang lebih langsung terkait isu ini agar studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ketiga elemen ini berfungsi secara simultan dan mempengaruhi hasil kebijakan di panggung internasional. Penelitian Johnson memberikan wawasan penting tentang pengaruh lobi internasional terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam konteks isu Palestina (Peng et al., 2019). Johnson menjelaskan bagaimana lobi seperti AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) memengaruhi pengambilan keputusan di Kongres dan mendorong posisi pro-Israel dalam kebijakan luar negeri AS, yang berujung pada penggunaan hak veto untuk melindungi tindakan Israel di PBB (Khanam, 2022; Munir et al., 2023; Peng et al., 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa lobi membawa perspektif bisnis dan politik yang signifikan dalam memodifikasi kebijakan luar negeri AS. Selain itu, temuan Johnson sejalan dengan studi yang membahas bagaimana tekanan dari lobi dapat menciptakan hambatan bagi negosiasi

internasional dan meningkatkan ketegangan dalam konflik, seperti yang terlihat dalam respons Amerika Serikat terhadap resolusi PBB yang berkaitan dengan Palestina (Andira et al., 2024; Hagen et al., 2020; Peng et al., 2019) Studi semacam ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara kekuatan lobi, strategi veto, dan hasil negosiasi yang terjadi di panggung internasional. Dengan menempatkan dinamika ini dalam konteks yang lebih luas, penelitian Johnson membantu menjelaskan fenomena di mana kebijakan luar negeri AS sering dianggap tidak sejalan dengan konsensus internasional yang lebih luas (Huddleston, 2019; Palieieva, 2021; Peng et al., 2019).

Sumber-sumber seperti jurnal internasional dan laporan PBB dapat menjadi dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai isu negosiasi, veto, dan lobi dalam konteks kebijakan luar negeri AS, terutama yang berkaitan dengan konflik Palestina. Salah satu referensi yang relevan adalah penelitian dari Kuchyk. Kuchyk, yang membahas efektivitas proses pengambilan keputusan dalam organisasi keamanan internasional dan memberikan wawasan tentang bagaimana hak veto dimanfaatkan oleh anggota tetap untuk menggagalkan resolusi yang bertentangan dengan kepentingan mereka, yang sangat terkait dengan strategi lobi yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti AIPAC (Kuchyk et al., 2024)(Kuchyk et al., 2024).

Lebih lanjut, Mukhtaruddin dan Kang menyoroti peran aktif Malaysia dalam Dewan Keamanan PBB dan memberikan konteks tentang dinamika politik dengan negara-negara anggota lainnya, yang bisa memberikan perspektif tentang bagaimana anggapan negosiasi dan veto beroperasi dalam konteks yang lebih luas (Mukhtaruddin & Kang, 2023). Sebagai contoh, Zahed mendiskusikan bagaimana situasi geopolitik mempengaruhi kebijakan luar negeri, yang relevan untuk memahami konteks yang dihadapi negara seperti AS dalam pengambilan keputusan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan analisis yang mendalam tentang dampak lobi internasional terhadap kebijakan veto yang diterapkan oleh negara-negara besar di PBB (Zahed, 2023).

Dengan mengkombinasikan analisis dari berbagai sumber tersebut, penelitian ini dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai interaksi antara negosiasi, veto, dan pengaruh lobi internasional, yang dapat memperkuat argumen dalam studi yang lebih luas mengenai konflik internasional dan kebijakan luar negeri. Penelitian sebelumnya umumnya lebih fokus pada satu aspek tertentu, seperti veto atau lobi internasional, dalam konflik Palestina, dan kurang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut secara bersamaan. Misalnya, penelitian oleh Harold & Sellers dan Smerat menyoroti dampak kebijakan tertentu, tetapi tidak mengeksplorasi interaksi antara veto, lobi, dan proses negosiasi secara menyeluruh (Harold & Sellers, 2018; Smerat, 2025) mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, tetapi tidak membahas bagaimana lobi dapat mendukung atau menghalangi negosiasi melalui penggunaan veto (So, 2023).

Kekurangan dalam literatur ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk analisis yang lebih holistik, di mana kombinasi elemen-elemen tersebut dapat diidentifikasi dan dipahami dalam konteks penerapan kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina. Penelitian terkini yang berfokus pada interaksi antara lobi, veto, dan negosiasi dapat memberi wawasan baru, belajar dari kesenjangan yang ditunjukkan dalam karya-karya sebelumnya. Misalnya, Johnson memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh lobi yang hanya terfokus pada kebijakan luar negeri AS, tanpa mengaitkan hasilnya dengan veto yang digunakan dalam resolusi PBB (Khadafi et al., 2023; Peng et al., 2019).

Dengan demikian, studi lanjut yang menggabungkan analisis lobi internasional, hak veto, dan proses negosiasi di PBB diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai dinamika konflik Palestina dan kebijakan luar negeri yang terlibat di dalamnya hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh berbagai ahli yang mendalami isu

ini (Han et al., 2023; Naylor et al., 2018). Kesenjangan dalam penelitian ini menciptakan ruang yang signifikan untuk eksplorasi menyeluruh yang mengintegrasikan analisis negosiasi, veto, dan lobi dalam satu kajian, terutama dalam konteks konflik Palestina di PBB.

Dalam literatur yang ada, banyak penelitian cenderung terfokus pada satu elemen tunggal, seperti veto yang diadakan oleh negara-negara besar seperti AS (Gheyle, 2022), atau peran lobi dalam membentuk kebijakan luar negeri (Garton et al., 2021). Namun, penelitian oleh Bell dan Kitagawa 2024 menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam negosiasi dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kebijakan tanpa terlibat secara langsung (Bell & Kitagawa, 2024) (Bell & Kitagawa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi-dimensi yang saling terkait yang perlu digabungkan untuk analisis yang komprehensif.

Sebagai contoh, Garton menganalisis peran lobi dalam kebijakan nutrisi di berbagai forum perdagangan internasional, tetapi tidak mengaitkan dengan penggunaan veto dalam keputusan kebijakan sekutu yang lebih besar (Garton et al., 2021). Di sisi lain, penelitian oleh Gheyle yang mempertimbangkan strategi untuk menghindari veto dalam kebijakan perdagangan menunjukkan mekanisme yang belum banyak diidentifikasi dalam konteks lobi dan negosiasi (Gheyle, 2022). Oleh karena itu, integrasi ketiga elemen ini dalam satu studi dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik, menjelaskan bagaimana ketiganya saling berinteraksi dan mempengaruhi hasil kebijakan di panggung internasional, khususnya dalam konteks isu-isu yang kompleks dan kontroversial seperti yang terjadi dalam konflik Palestina.

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan dan analisis tentang bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dapat bervariasi dalam literatur yang ada, dan lebih banyak penelitian perlu dilakukan di bidang ini. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan ketiga faktor—negosiasi, veto, dan lobi—dalam menganalisis resolusi PBB tentang Palestina pada tahun 2017. Pendekatan holistik ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas interaksi antar elemen tersebut dan dampaknya terhadap keputusan kebijakan internasional.

Penelitian oleh Joronen membahas bagaimana praktik kolonial mempengaruhi ruang negosiasi Palestina, dan keterkaitannya dengan kekerasan politik. Ini menunjukkan bahwa dinamika yang ada di lapangan berpengaruh pada proses negosiasi yang dilakukan di arena internasional (Joronen, 2019). Di sisi lain, penelitian oleh Falah juga menyentuh aspek integrasi antara kebijakan dan lobi, yang menjadi kunci dalam memahami bagaimana lobi internasional berperan dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri (Falah, 2021). Selain itu, penelitian oleh Johnson menyoroti bagaimana pengaruh lobi internasional dapat mempengaruhi veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di PBB, terutama dalam konteks konflik Palestina Johnson (Peng et al., 2019).

Keterkaitannya dengan veto yang diberikan dalam resolusi PBB menunjukkan bahwa lobi tidak hanya berperan di tingkat domestik, tetapi juga memiliki dampak global dalam mempengaruhi hasil kebijakan di PBB. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, penelitian diharapkan bisa menjawab kesenjangan dalam literatur yang ada, serta memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ketiga elemen tersebut dalam kebijakan internasional, khususnya dalam konteks resolusi PBB tentang Palestina tahun 2017. Penelitian oleh Joronen membahas bagaimana praktik kolonial mempengaruhi ruang negosiasi Palestina, dan keterkaitannya dengan kekerasan politik. Ini menunjukkan bahwa dinamika yang ada di lapangan berpengaruh pada proses negosiasi yang dilakukan di arena internasional (Joronen, 2019). Di sisi lain, penelitian oleh Falah juga menyentuh aspek integrasi antara kebijakan dan lobi, yang menjadi kunci dalam memahami bagaimana lobi internasional berperan dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri (Falah, 2021).

Selain itu, penelitian oleh Johnson menyoroti bagaimana pengaruh lobi internasional dapat mempengaruhi veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di PBB, terutama dalam konteks konflik Palestina (Peng et al., 2019). Penelitian mengenai pengaruh dominan Amerika Serikat (AS) dalam kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina sering kali menunjukkan bahwa AS menggunakan hak veto secara konsisten di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingan Israel. Hal ini terlihat dalam berbagai resolusi yang disahkan, di mana AS berperan aktif dalam menggagalkan resolusi yang mungkin merugikan Israel. Selain itu, tekanan domestik melalui lobi, seperti AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), juga terbukti memengaruhi kebijakan luar negeri AS. Lobi ini berusaha untuk memvariasikan dukungan pada kebijakan yang pro-Israel di tingkat Kongres, serta memengaruhi persepsi publik mengenai isu terkait Palestina.

Referensi oleh Johnson memberikan wawasan mendalam terkait pengaruh lobi terhadap keputusan politik, mengungkapkan bahwa lobi tidak hanya membentuk kebijakan domestik tetapi juga memiliki dampak global, termasuk pada keputusan PBB mengenai Palestina (Peng et al., 2019). Penelitian lainnya juga mencatat bahwa veto AS sering digunakan sebagai alat untuk menegakkan kebijakan luar negeri yang didukung oleh lobi, yang menghambat upaya untuk mencapai solusi damai yang adil bagi konflik tersebut. Dengan demikian, pengaruh dominan AS, baik melalui veto maupun tekanan domestik dari lobi, menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan internasional mengenai konflik Palestina, menjadikannya area kajian yang penting untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa negara-negara lain terlibat dalam negosiasi untuk mempengaruhi hasil resolusi PBB tentang Palestina, meskipun terdapat dominasi AS melalui veto dan lobi internasional. Meskipun AS memiliki pengaruh yang signifikan, banyak negara anggota PBB yang tetap mencari cara untuk menciptakan konsensus dan mendorong resolusi yang lebih mendukung posisi Palestina. Hasil analisis oleh Ghaffar menunjukkan bahwa PBB memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara negara-negara dan memberikan kerangka kerja untuk resolusi sengketa. Ini mengindikasikan bahwa meskipun AS memiliki veto, proses negosiasi dapat diupayakan oleh negara lain dalam forum internasional, menciptakan peluang untuk kolaborasi dan pengaruh dalam hasil keputusan (Ghaffar et al., 2023).

Namun, perlu dicatat bahwa Ghaffar, lebih fokus pada analisis bibliometrik tentang kemajuan penelitian dalam batas penetapan dan bukan secara langsung membahas peran PBB terkait konflik Palestina (Ghaffar et al., 2023). Lebih lanjut, Zhumatay mencatat bahwa sejarah konflik Palestina menunjukkan bahwa beberapa negara anggota PBB berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dalam negosiasi untuk mendalami isu-isu yang mendasar (Zhumatay, 2024). Penelitian oleh White menekankan pentingnya diplomasi dalam konteks konflik dan bagaimana resolusi PBB yang relevan dapat mengurangi kemungkinan konflik yang lebih besar, menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi alat yang efektif meskipun ada veto (White et al., 2018).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti keterlibatan aktif negara-negara lain di PBB dalam negosiasi mengenai Palestina, sehingga memperluas perspektif tentang bagaimana kekuatan dominan bisa diimbangi dengan upaya kolektif negara lain untuk mencapai hasil yang lebih adil dalam konflik ini.

KERANGKA TEORI KONSEP

Teori Realisme

Teori realisme dalam hubungan internasional berfokus pada **kepentingan nasional negara** yang didorong oleh kebutuhan untuk **mempertahankan kekuasaan dan**

keamanan. Negara-negara, menurut teori ini, bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, yang sering kali berkaitan dengan penguatan posisi mereka dalam sistem internasional. Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS), realisme memberikan penjelasan yang kuat mengenai **mengapa AS secara konsisten mendukung Israel** dalam konflik Palestina, serta alasan di balik penggunaan **hak veto** dalam Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi yang dapat merugikan Israel.

Keputusan AS untuk menggunakan hak vetonya dapat dilihat sebagai **strategi untuk menjaga kepentingan strategisnya** di Timur Tengah, yang melibatkan **koalisi dengan Israel** dan pengaruhnya terhadap negara-negara Arab dan Islam. Dalam teori realisme, hubungan antara AS dan Israel dianggap sebagai bagian dari **strategi keamanan** untuk memperkuat posisi AS di kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ketegangan geopolitik tinggi. Meskipun ada suara mayoritas negara-negara lainnya yang mendukung Palestina di PBB, AS tetap menegaskan veto-nya untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan aliansi tersebut.

Sebagai tambahan, teori ini juga menyarankan bahwa **konflik dan ketegangan internasional** seperti yang terjadi dalam konteks Palestina sering kali lebih dipengaruhi oleh **perhitungan kekuasaan** daripada nilai-nilai moral atau kemanusiaan. Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara besar seperti AS sering kali **mengutamakan kepentingan strategis** mereka di atas upaya untuk mencapai resolusi damai yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep Lobi Internasional

Lobi internasional, khususnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan kepentingan tertentu, memainkan peran penting dalam **membentuk kebijakan luar negeri** negara-negara besar seperti AS. Di Amerika Serikat, kelompok seperti **AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)** memiliki pengaruh yang sangat besar dalam **mempengaruhi kebijakan politik domestik dan internasional**. AIPAC dan kelompok pro-Israel lainnya memanfaatkan **lobi politik, dukungan media, dan think tanks** untuk menekan pemerintah AS agar tetap mendukung kebijakan yang pro-Israel, meskipun hal tersebut bisa memperburuk hubungan AS dengan negara-negara lain, terutama di dunia Arab dan negara-negara berkembang.

Lobi ini memainkan peran yang signifikan dalam **memobilisasi dukungan politik di Kongres AS**, yang sering kali berujung pada **pembuatan kebijakan luar negeri** yang lebih cenderung mendukung Israel. Melalui tekanan domestik ini, lobi internasional berhasil membentuk persepsi dan **penyusunan kebijakan luar negeri AS**, termasuk penggunaan **hak veto** dalam resolusi PBB mengenai Palestina.

Konsep lobi internasional juga mencakup pengaruh yang lebih luas yang dimiliki oleh **pihak-pihak non-negara** (seperti organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan bahkan media) dalam **mempengaruhi keputusan kebijakan** negara besar. Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh **negara-negara itu sendiri**, tetapi juga dipengaruhi oleh **interaksi dengan aktor non-negara**, yang sering kali memiliki kepentingan yang berbeda dari negara-negara besar tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi kasus** untuk memahami pengaruh veto, lobi, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan PBB terkait Palestina. Penelitian ini berfokus pada resolusi PBB mengenai Palestina tahun 2017.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah **studi literatur**, yang mencakup:

Jurnal Hubungan Internasional yang relevan untuk mengidentifikasi teori-teori dasar tentang veto, lobi, dan negosiasi dalam kebijakan luar negeri.

Voting record PBB untuk mendapatkan data konkret mengenai sikap negara-negara anggota terhadap resolusi PBB mengenai Palestina.

Laporan dari NGO yang memberikan pandangan tentang bagaimana lobi internasional dan kekuatan politik lainnya berperan dalam pembentukan kebijakan.

Berita dari media internasional terkemuka seperti **BBC** dan **Al Jazeera** untuk memperoleh informasi tentang peristiwa terkini, serta bagaimana media internasional menginterpretasikan kebijakan terkait Palestina.

Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis isi**, untuk menggali tema-tema dan pola-pola yang muncul dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Dalam analisis ini, data akan dikategorikan berdasarkan topik-topik kunci, seperti peran veto, pengaruh lobi internasional, dan dinamika negosiasi dalam pengambilan keputusan PBB. Proses analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkodekan teks, kemudian mencari hubungan antara temuan yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ketiga elemen tersebut mempengaruhi keputusan kebijakan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh veto, lobi internasional, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan PBB terkait resolusi Palestina, khususnya yang terjadi pada tahun 2017. Melalui analisis terhadap voting record PBB, studi literatur, dan data dari berbagai sumber, dapat ditemukan bahwa meskipun mayoritas negara anggota PBB mendukung resolusi yang menguntungkan Palestina, keputusan AS untuk menggunakan hak vetonya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kebijakan luar negeri AS yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya (Ghaffar et al., 2023; Zhumatay, 2024). Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keputusan ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh lobi internasional, khususnya AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) (Garber-Lachish et al., 2023; White et al., 2018). AIPAC memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan politik domestik AS, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, terutama yang terkait dengan Israel dan Palestina (Lærkner et al., 2019).

Dalam hal ini, AIPAC dan kelompok-kelompok pro-Israel lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa AS tetap mengambil sikap yang mendukung Israel, meskipun ini bertentangan dengan suara mayoritas negara-negara anggota PBB. Sebagaimana diungkapkan dalam pendahuluan, analisis terhadap dinamika ini membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan eksternal dan internal mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara besar, terutama dalam konteks hubungan internasional yang kompleks (Samerwong et al., 2017). Teori realisme dalam ilmu hubungan internasional menjelaskan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya yang utama, yaitu kekuasaan dan keamanan (Çuhadar et al., 2017). Dalam kasus ini, kebijakan AS tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan strategisnya di Timur Tengah, tetapi juga oleh kepentingan domestik yang berkaitan dengan lobi internasional yang memiliki kekuatan besar (Dahl-Eriksen, 2021).

Selain itu, pengaruh veto AS dalam resolusi Palestina ini memperlihatkan bagaimana negosiasi internasional beroperasi dalam suatu kerangka kekuasaan yang sangat tidak seimbang. Meskipun mayoritas negara mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, AS

memanfaatkan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem PBB, kekuatan besar seperti AS dapat mendikte hasil akhir dari suatu keputusan, meskipun tidak mendapat dukungan penuh dari anggota lainnya (Hoang et al., 2018). Dalam hal ini, veto yang diberikan oleh AS bukan hanya mencerminkan kepentingan nasional mereka, tetapi juga menyoroti ketidakadilan yang ada dalam sistem internasional yang dibentuk oleh negara-negara dengan kekuatan besar (Sevgi-Sole & Ünalı, 2020).

Lebih lanjut, analisis terhadap voting record PBB menunjukkan bahwa meskipun mayoritas negara mendukung Palestina, keputusan AS untuk memveto resolusi ini merupakan contoh jelas dari pengaruh kekuatan politik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan internasional (Nilsson & Fougère, 2024). Keputusan ini tidak hanya berimplikasi pada hubungan internasional di Timur Tengah, tetapi juga mengindikasikan bahwa negara-negara besar, seperti AS, memiliki kapasitas untuk memengaruhi hasil resolusi internasional yang berhubungan dengan konflik global, seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina (O'Leary et al., 2012). Dalam hal ini, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan domestik yang ada, seperti lobi internasional, meskipun ini tidak selalu mencerminkan kehendak mayoritas negara lain di PBB (Okitasari et al., 2021).

Dari segi teori, temuan ini sejalan dengan pemikiran dari para ahli hubungan internasional yang berpendapat bahwa keputusan politik internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan internal negara yang memengaruhi kebijakan luar negeri mereka (Jackson, 2021). Ini juga mendukung teori realisme yang menekankan bahwa negara-negara akan bertindak untuk memperkuat kekuasaan dan mempertahankan keamanan nasional mereka, bahkan jika keputusan tersebut bertentangan dengan mayoritas internasional (Santoire, 2021). Oleh karena itu, dalam konteks ini, veto yang diberikan oleh AS tidak hanya mencerminkan dominasi negara besar dalam proses pengambilan keputusan internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik yang lebih kompleks, seperti tekanan dari kelompok lobi internasional (Mallah & Jaaron, 2021).

Sebagai tambahan, penting untuk dicatat bahwa meskipun veto AS berhasil menggagalkan resolusi yang mendukung Palestina, ini tidak berarti bahwa situasi di kawasan tersebut tidak akan berubah. Negosiasi internasional yang melibatkan negara-negara besar dan kelompok-kelompok pro-Palestina tetap berlanjut, meskipun keputusan PBB tidak sesuai dengan harapan mereka (Dijkstra et al., 2019). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan luar negeri AS didorong oleh kepentingan nasional yang kuat, resolusi internasional lainnya yang mendukung Palestina tetap akan menjadi bagian dari negosiasi global yang lebih luas (Charters & Heffernan, 2021).

Dari hasil analisis ini, kita juga dapat melihat bahwa peran lobi internasional sangat signifikan dalam memengaruhi kebijakan negara-negara besar, terutama AS. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya hasil dari keputusan politik negara, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan-tekanan eksternal yang datang dari kelompok-kelompok dengan kepentingan khusus. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bagaimana kompleksnya pengambilan keputusan dalam diplomasi internasional, terutama yang melibatkan konflik berkepanjangan seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina (Landa-Avila et al., 2021). Dalam pembahasan ini, kita juga harus mempertimbangkan keterbatasan yang ada, yaitu ketergantungan pada sumber-sumber sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan pandangan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang melibatkan wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam negosiasi internasional terkait Palestina akan sangat berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang dinamika lobi internasional dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar..

KESIMPULAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam PBB terkait resolusi Palestina sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara tersebut, yang tidak hanya didorong oleh kepentingan strategis internasional, tetapi juga oleh lobi domestik yang kuat, khususnya dari kelompok-kelompok pro-Israel seperti AIPAC. Meskipun mayoritas negara mendukung Palestina, keputusan AS untuk menggunakan hak vetonya mencerminkan ketidakadilan dalam sistem PBB yang didominasi oleh kekuatan negara besar. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lobi internasional memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar, yang menunjukkan bahwa keputusan internasional sering kali lebih dipengaruhi oleh kekuatan domestik dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu daripada oleh kehendak mayoritas negara anggota PBB. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kebijakan luar negeri negara besar dalam analisis diplomasi internasional, terutama yang terkait dengan konflik global seperti isu Palestina.

Referensi

- Afrilianti, D., Ardianto, B., & Pebrianto, D. Y. (2021). Pengapusian Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Uti Possidetis Journal of International Law*, 2(2), 210–234. <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12114>
- Andira, T. A., Siregar, E. S., Rizma, W. M., Nasution, Z. R., Khadafi, M., Suherman, J. K., Nasution, F. A., & Azmi, K. I. (2024). Peran Hukum Internasional Pada Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Sengketa Palestine Serta Israel). *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)*, 5(01), 41–49. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5572>
- Anesi, V., & Bowen, T. R. (2021). Policy Experimentation in Committees: A Case Against Veto Rights Under Redistributive Constraints. *American Economic Journal Microeconomics*, 13(3), 124–162. <https://doi.org/10.1257/mic.20190023>
- Annisarahma, R., & Assegaf, A. H. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tempo.co Dan CNNIndonesia.com Mengenai Konflik Israel-Hamas Pada Oktober 2023. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6), 3343–3357. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15765>
- Balci, A. (2022). Controlling International Institutions: How the US Engineered UNSC Non-permanent Members in the Early Cold War. *Global Policy*, 13(2), 259–270. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13039>
- Bell, S. R., & Kitagawa, R. (2024). From Participation to Provision: How Civil Society Secures Procedural Rights Through Peace Negotiations. *Conflict Management and Peace Science*, 42(3), 288–307. <https://doi.org/10.1177/07388942241255195>
- Brata, T. A., Sudarmanto, E., Lubis, A. F., & Hasibuan, K. (2023). Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Gaza. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1047–1056. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795>
- Charters, B., & Heffernan, T. (2021). A Conceptual Model Identifying Apartment Owners' Attitude Formation Towards Solar Photovoltaic (PV) Adoption. *Property Management*, 39(3), 325–342. <https://doi.org/10.1108/pm-08-2020-0049>
- Corell, H. (2019). UN Security Council Reform—The Council Must Lead by Example. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 22(1), 1–33. https://doi.org/10.1163/18757413_022001002
- Çuhadar, E., Kaarbo, J., Kesgin, B., & Özkeçeci-Taner, B. (2017). Examining Leaders' Orientations to Structural Constraints: Turkey's 1991 and 2003 Iraq War Decisions. *Journal of International Relations and Development*, 20(1), 29–54. <https://doi.org/10.1057/jird.2014.31>
- Dahl-Eriksen, T. (2021). Responsibility to Protect and Rising Asian Powers. *Millennial Asia*, 13(2), 225–242. <https://doi.org/10.1177/0976399621989464>
- Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Jurnal Yustitiabelen*, 10(1), 62–86. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.908>
- Dijkstra, H., Petrov, P., & Mahr, E. (2019). Learning to Deploy Civilian Capabilities: How the United Nations, Organization for Security and Co-Operation in Europe and European Union Have Changed Their Crisis Management Institutions. *Cooperation and Conflict*, 54(4), 524–543. <https://doi.org/10.1177/0010836718823814>
- Evers, M. (2022). Discovering the Prize: Information, Lobbying, and the Origins of US–Saudi Security Relations. *European Journal of International Relations*, 29(1), 104–128. <https://doi.org/10.1177/13540661221115961>
- Falah, G. (2021). The (Im)possibility of Achieving a Peaceful Solution to the Israeli-Palestinian Conflict. *Human Geography*, 14(3), 333–345. <https://doi.org/10.1177/19427786211019014>
- Garber-Lachish, S., Moran, S., Keysar, B., & Bereby-Meyer, Y. (2023). *Negotiators Deceive Much Less Than We Think: a Theory of Distrust in Negotiation*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/qnfwe>
- Garton, K., Swinburn, B., & Thow, A. M. (2021). Who Influences Nutrition Policy Space Using International Trade and Investment Agreements? A Global Stakeholder Analysis. *Globalization and Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00764-7>
- Ghaffar, A. Z., Abdullah, A. G., & Sugito, N. T. (2023). Bibliometric Analysis of Five Decades Research Progress on Boundary Delimitation. *Media Komunikasi Geografi*, 24(2), 126–140. <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.63502>
- Gheyle, N. (2022). Evading Vetoes: Exiting the Politicized Decision Trap in EU Trade Policy. *JCMS Journal of Common Market Studies*, 60(6), 1723–1740. <https://doi.org/10.1111/jcms.13343>
- Gordanić, J. (2022). The Ukraine Crisis 2022 — An Alarm for the Reform of the UN Security Council? *The Review of International Affairs*, 73(1186), 125–146. https://doi.org/10.18485/iipe_ria.2022.73.1186.6
- Hagen, A., Altamirano-Cabrera, J.-C., & Weikard, H. (2020). National Political Pressure Groups and the Stability of International Environmental Agreements. *International Environmental Agreements Politics Law and Economics*, 21(3), 405–425. <https://doi.org/10.1007/s10784-020-09520-5>
- Han, X., Yuan, T., Wang, D., Zhao, Z., & Gong, B. (2023). How to Understand High Global Food Price? Using SHAP to Interpret Machine Learning Algorithm. *Plos One*, 18(8), e0290120. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290120>

- Harold, G. T., & Sellers, R. (2018). Annual Research Review: Interparental Conflict and Youth Psychopathology: An Evidence Review and Practice Focused Update. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 374–402. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12893>
- Hoang, C., Satyal, P., & Corbera, E. (2018). 'This Is My Garden': Justice Claims and Struggles Over Forests in Vietnam's REDD+. *Climate Policy*, 19(sup1), S23–S35. <https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1527202>
- Huddleston, R. J. (2019). Shoestring Diplomacy: Aspiring States and International Lobbying for Self-Determination. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3367080>
- Ihsan, M. A. (2019). Decision Making Process Dalam Kebijakan Israel (Studi Kasus Penolakan Israel Terhadap Resolusi DK PBB 2334). *Journal of Islamic World and Politics*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jiwp.3129>
- Jackson, M. R. (2021). Addressing Inequity Through Public Health, Community Development, Arts, and Culture: Confluence of Fields and the Opportunity to Reframe, Retool, and Repair. *Health Promotion Practice*, 22(1_suppl), 141S–146S. <https://doi.org/10.1177/1524839921996369>
- Joronen, M. (2019). Negotiating Colonial Violence: Spaces of Precarisation in Palestine. *Antipode*, 51(3), 838–857. <https://doi.org/10.1111/anti.12518>
- Kattan, V. (2018). Why U.S. Recognition of Jerusalem Could Be Contrary to International Law. *Journal of Palestine Studies*, 47(3), 72–92. <https://doi.org/10.1525/jps.2018.47.3.72>
- Khadafi, B. R. Y., Salahudin, S., & Yumitro, G. (2023). The Art of Defense Diplomacy: How New Forms of Diplomacy Are Shaping International Relations. *Jurnal Pertahanan Media Informasi TTG Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity Nasionalism & Integrity*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.33172/jp.v9i1.2465>
- Khafis, M., Tulaila, B., Irena, D., Hasanah, A., & Ardianto, B. (2024). Analisis Penggunaan Hak Veto Dan Dampaknya Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Palestina. *Jimr*, 2(6), 330–334. <https://doi.org/10.62504/jimr596>
- Khaketla, M., Carr, T., Dubuka, N., Quinn, B., Reeder, B., Sarker, K. K., Addae, A., Ali, A., Groot, G., Sari, N., Vanstone, J., Hartness, C., & Zayed, R. (2022). Community and Public Health Responses to a COVID-19 Outbreak in North-West Saskatchewan: Challenges, Successes, and Lessons Learned. *International Journal of Indigenous Health*, 17(1). <https://doi.org/10.32799/ijih.v17i1.36703>
- Khanam, M. (2022). The Impact of the Indian Lobby on the United States' Pakistani Policy. *Pakistan Journal of International Affairs*, 5(3). <https://doi.org/10.52337/pjia.v5i4.651>
- Khouri, L. Z. (2019). The Normative Unconscious of Nations: A Critical Geopolitical and Psychoanalytic Perspectives on the United Nations Security Council's Counterterrorism Strategy. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 16(4), 244–257. <https://doi.org/10.1002/aps.1635>
- König, T. (2018). Still the Century of Intergovernmentalism? Partisan Ideology, Two-level Bargains and Technocratic Governance in the Post-Maastricht Era. *JCMS Journal of Common Market Studies*, 56(6), 1240–1262. <https://doi.org/10.1111/jcms.12738>
- Kuchyk, O., Hohosha, O., Shalenna, N., Kut, M., & Kushta, O. (2024). Effectiveness of the Decision-Making Process in International Security Organizations in the Context of International Crises. *PJC*, 16.2, 231–246. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.231.246>
- Lærkner, E., Egerod, I., Olesen, F., Toft, P., & Hansen, H. P. (2019). Negotiated Mobilisation: An Ethnographic Exploration of Nurse–patient Interactions in an Intensive Care Unit. *Journal of Clinical Nursing*, 28(11–12), 2329–2339. <https://doi.org/10.1111/jocn.14828>
- Landa-Avila, C., Escobar-Tello, C., Jun, G. T., & Cain, R. (2021). Multiple Outcome Interactions in Healthcare Systems: A Participatory Outcome Mapping Approach. *Ergonomics*, 65(3), 362–383. <https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1961018>
- Luerdi, L. (2022). *Indonesia Dan Solidaritas Palestina*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cx2vw>
- Mallah, M. F., & Jaaron, A. A. (2021). An Investigation of the Interrelationship Between Corporate Social Responsibility and Sustainability in Manufacturing Organisations: An Empirical Study. *International Journal of Business Performance Management*, 22(1), 15. <https://doi.org/10.1504/ijbpm.2021.112125>
- Mangapul, J. H. (2019). Reforming the United Nations: Realities, Expectations, and the Way Forward. *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/pjil.v3i1.323>
- Mukhtaruddin, J., & Kang, B. Z. (2023). Malaysia's Active Role in the United Nations Security Council. *International Journal of Professional Business Review*, 8(1), e01259. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1259>
- Munir, J., Faiza, M., Jamal, B., Daud, S., & Iqbal, K. (2023). The Impact of Socio-Economic Status on Academic Achievement. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 695–705. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.308>
- Naylor, N. R., Atun, R., Zhu, N., Kulasabanathan, K., Silva, S., Chatterjee, A., Knight, G. M., & Robotham, J. V. (2018). Estimating the Burden of Antimicrobial Resistance: A Systematic Literature Review. *Antimicrobial Resistance and Infection Control*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s13756-018-0336-y>
- Nilsson, E., & Fougère, M. (2024). Global South States' Views on Building Partnerships With Corporations: An Agonistic Struggle in the UN and Beyond. *Journal of Business Ethics*, 197(3), 445–463. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05745-5>
- Nurhasanah, R., & Setiawati, S. P. D. (2024). Keterlibatan Indonesia Dalam Proses Perdamaian Konflik Palestina-

- Israel. *Nirwasita*, 5(1), 44–57. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v5i1.3530>
- O’Leary, R., Choi, Y., & Gérard, C. (2012). The Skill Set of the Successful Collaborator. *Public Administration Review*, 72(51). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02667.x>
- Okitasari, M., Prabowo, M. H., & Santono, H. (2021). 20210426. *Social Development Issues*, 42(3). <https://doi.org/10.3998/sdi.17872073.0042.305>
- Oktaviani, S. (2021). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Tahun 2017. *Global Political Studies Journal*, 5(1), 28–44. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i1.5884>
- Palieieva, Y. S. (2021). Genesis of the Concept of Diplomacy. *Bulletin of Alfred Nobel University Series Law*, 2(3), 109–114. <https://doi.org/10.32342/2709-6408-2021-2-3-13>
- Peng, J., Rushton, M., Johnson, C., Brezden-Masley, C., Sulpher, J., Chiu, M. G., Graham, I. D., & Dent, S. (2019). An international survey of healthcare providers’ knowledge of cardiac complications of cancer treatments. *Cardio-Oncology*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40959-019-0049-2>
- Rolf, J. N., Janssen, N. J., & Liedtke, M. (2021). Projecting General Assembly Voting Records Onto an Enlarged Security Council: An Analysis of the G4 Reform Proposal. *Global Policy*, 12(3), 313–324. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12934>
- Ruhiat, F., & Akim, A. (2020). Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 19–30. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3361.19-30>
- Samerwong, P., Bush, S. R., & Oosterveer, P. (2017). Metagoverning Aquaculture Standards: A Comparison of the GSSI, the ASEAN GAP, and the ISEAL. *The Journal of Environment & Development*, 26(4), 429–451. <https://doi.org/10.1177/1070496517736872>
- Santoire, B. (2021). New Directions in Women, Peace and Security. *International Feminist Journal of Politics*, 23(5), 839–841. <https://doi.org/10.1080/14616742.2021.1927790>
- Satris, R. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. *Politea*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>
- Sembiring, A. E. B., & Oktreza, K. (2024). Indonesia’s Support in the Ongoing Conflict Between Israel and Palestine. *Jetish Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(1), 512–521. <https://doi.org/10.57235/jetish.v3i1.1940>
- Sevgi-Sole, E., & Ünalı, A. (2020). Rater Negotiation Scheme: How Writing Raters Resolve Score Discrepancies. *Assessing Writing*, 45, 100466. <https://doi.org/10.1016/j.asw.2020.100466>
- Smerat, H. (2025). Patient Satisfaction With the Quality of Nursing Care in Critical Care Units and Medical Wards in West Bank Hospitals, Palestine: A Cross-Sectional Study. *Plos One*, 20(4), e0322804. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322804>
- So, F. (2023). Serious Conflicts With Benign Outcomes? The Electoral Consequences of Conflictual Cabinet Terminations. *American Political Science Review*, 118(3), 1449–1463. <https://doi.org/10.1017/s000305542300093x>
- Syari’ah, A., Nabilah, N., & Wijayanti, R. (2022). KEKEJAMAN ISRAEL TERHADAP RAKYAT PALESTINA: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021. *Dinamika Sosial Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 58–80. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i1.1039>
- Thinane, J. (2021). *Missio hominum for social justice in South Africa : From missio Dei to missio hominum*. 1–7.
- White, P. B., Cunningham, D., & Beardsley, K. (2018). Where, When, and How Does the UN Work to Prevent Civil War in Self-Determination Disputes? *Journal of Peace Research*, 55(3), 380–394. <https://doi.org/10.1177/0022343317744826>
- Wood, B., Baker, P., & Sacks, G. (2021). Conceptualising the Commercial Determinants of Health Using a Power Lens: A Review and Synthesis of Existing Frameworks. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.05>
- Zahed, I. U. M. (2023). Impact of the Geopolitical Status Quo Vis-à-vis the Rohingya Crisis on the Social, Economic, and Political Aspects of Bangladesh. *Asian Politics & Policy*, 15(4), 643–667. <https://doi.org/10.1111/aspp.12716>
- Zhumatay, G. (2024). The Historical-Ideological Roots of the Zionist-Israeli Settler Colonialism and Ethnic Cleansing of Palestine. *Journal of Oriental Studies*, 108(1). <https://doi.org/10.26577/jos.2024.v108.i1.04>